

Judul : Pemerintah di atas angin, jangan mau dipermainkan
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Proses Divestasi Saham PT Vale Masih Molor

Pemerintah Di Atas Angin, Jangan Mau Dipermainkan

Senayan menyoroti sikap PT Vale Indonesia yang terus mengulur-ngulur proses divestasi saham kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), MIND.ID. Pemerintah pun diminta segera bersikap. Jika perlu mencutikan lahan milik PT Vale yang ada saat ini.

DIVESTASI saham ini merupakan syarat bagi PT Vale Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk operasional tambangnya di kawasan Sulawesi. Adapun Kontrak Karya PT Vale Indonesia akan berakhir pada tahun 2025.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, Pemerintah Indonesia sebagai pemberi izin, tidak boleh lemah dalam menghadapi sikap PT Vale yang terus mengulur-ngulur proses divestasi. Apalagi, Vale Canada Limited masih enggan menurunkan harga dan besaran saham miliknya agar MIND.ID dapat menjadi pemilik saham mayoritas 51 persen.

"Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi," kata Mulyanto, Kamis (11/1/2024).

Karena sikap PT Vale tersebut, rencana divestasi molor dari jadwal. Namun, dia melihat justru Pemerintah terkesan tersandera dengan proses divestasi ini. Pemerintah sebagai pemberi izin, jangan mau tunduk pada kemauan PT Vale.

Sebagaimana diketahui, Vale Canada Limited menjadi pemilik saham mayoritas di PT Vale Indonesia dengan jumlah 4,35 miliar lembar saham, 43,79

persen dari total saham.

Disusul PT Mineral Industri Indonesia atau MIND.ID sebesar 1,98 miliar lembar saham atau 20 persen, kemudian PT Sumitomo 1,49 miliar (15,03 persen) dan Vale Japan Limited sebanyak 54 juta lembar saham (0,54 persen).

Namun, PT Vale hanya mau melepas sahamnya sebesar 14 persen dari jumlah yang ada. Dengan jumlah tersebut, saham MIND.ID bertambah menjadi 34 persen, dan Vale Canada Limited selaku anak usaha Vale Base Metals Limited menjadi 33,9 persen saham. Sedangkan Sumitomo Metal Mining Co Ltd menjadi 11,5 persen.

Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan, raker Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak Pemerintah menjalankan konstitusi. Agar, Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

Selain itu, Indonesia juga diberikan hak menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan.

"Pemerintah harus segera bersikap dan mencutikan lahan produksi Vale ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan, proses divestasi saham ini tidak boleh mengabaikan kepentingan daerah. Sebab, dalam audiensi Komisi VII DPR bersama para gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, meminta agar Pemerintah pusat mau menyerahkan sebagian lahan Vale untuk dikelola daerah.

"Pemda sudah lama teriak-teriak soal lahan Vale yang dianggurkan tidak produktif tersebut. Ini tidak boleh diabaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi meminta Pemerintah Indonesia tidak terkecoh dengan strategi PT Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining

Co.Ltd soal proses divestasi saham di PT Vale Indonesia. Sebab, proporsi saham yang ditawarkan kedua pemilik saham terbesar tersebut tidak menjamin Pemerintah sebagai pemegang kendali di PT Vale Indonesia.

"Kita jangan terkecoh. Seolah-olah MIND.ID 34 persen, Vale Canada 33 persen, tapi sebenarnya mereka paling besar. Karena sebenarnya mereka ini koalisi antara Vale Canada dan Sumitomo ini," kata Haryadi.

Haryadi menilai, komposisi divestasi tersebut hanya akal-akalan dari Vale Canada dan Sumitomo sehingga kelihatan seakan-akan Indonesia menjadi saham terbesar.

Kepemilikan saham tersebut tidak menjadikan Pemerintah sebagai saham pengendali. Sebab, antara Sumitomo dan Vale Canada ini terjadi koalisi permanen, sehingga ketika pengambilan keputusan strategis, Pemerintah Indonesia tetap kalah. ■ KAL